**PERBEDAAN KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM
DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA**

Dani Chaniago

Email : danichaniago32@gmail.com

No BP : 2110003600317

Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi berasal dari kata Yunani *άνθρωπος* (baca: *anthropos*) yang berarti "manusia" atau "orang", dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia.

Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk beluk, unsur-unsur, kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu antropologi hukum yang dipelajari adalah mengenai peran,

status atau kedudukan, nilai, norma juga kebudayaan. Semua ini sangat erat dengan ilmu antropologi hukum.

Sebelum berdirinya Komunisme, magistrat-magistrat Tiongkok, misalnya, tidak dengan menginterpretasi dan menerapkan aturan hukum untuk kasus-kasus konflik yang terjadi, namun menggunakan aturan hanya sebagai pedoman teladan yang sangat berguna, tetapi tidak harus diteladani dalam kasus konkrit. Dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan - peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khusus dibidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar aturan kaidah sosial yang telah ada didalam suatu masyarakat itu sendiri.

Hukum sebagai milik suatu masyarakat sebagai suatu keseluruhan menyediakan logistiknya, suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum saja yang mengendalikan perilaku semua anggotanya. Tanpa sedikit pun kontrol-kontrol sosial yang bekerja pada tingkat submasyarakat, subkelompok (misalnya, perkumpulan, kelompok orang yang hidup serumah, dan kelompok kerabat) telah secara sebuah prioritas kecualikan dari kemungkinan perilaku anggotanya dengan sistem yang diterapkan oleh pemimpin kelompok dalam keputusan - keputusan khusus sistem yang berdasarkan ciri-ciri khas esensinya sangat menyerupai hukum pada masyarakat yang mencakup semua kalangan. Hukum juga diartikan sebagai disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan) dan ilmu pengetahuan (ilmu hukum). Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu

tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan (misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum).

B. PEMBAHASAN

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum, oleh karena keduanya ingin mengerti dan dapat menjelaskan fenomena hukum itu dan bukan untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan, bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses dalam masyarakat, proses-proses yang lebih besar yang didalamnya termasuk hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:333). Menurut Satjipto Rahardjo (2000:333) karakteristik antropologi tampaknya memang terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan serta pemahamannya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia.

2. Kajian Antropologi Hukum

Di dalam perkembangan antropologi, masalah hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial-budaya. Menurut Ihromi (1986; 3) relevansi menelaah hukum dari segi antropologi, antara lain adalah: (a) Berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang (tentunya termasuk Indonesia) yang secara budaya bersifat pluralistis dalam cita-citanya mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum; (b) Berkenaan dengan kemungkinan munculnya masalah bila warga masyarakat dari lingkungan sukubangsa tertentu masih mempunyai norma-norma tradisional yang kuat dan menuntut ketaatan mengenai hal-hal tertentu, sedangkan dalam norma hukum yang sudah tertulis dan berlaku secara nasional, hal-hal yang harus ditaati itu justru dirumuskan sebagai hal yang terlarang.

Secara faktual, masalah-masalah yang dirumuskan ke dalam dua point utama itu sudah terjadi, baik berkenaan dengan munculnya konflik horisontal di pelbagai wilayah, pertikaian antara state (maupun pemda) dengan masyarakat, maupun antar kelompok masyarakat sendiri. Hukum, menurut Benda-Beckmann (1979; 113-114) adalah suatu cara khusus untuk membatasi otonomi anggota-anggota masyarakat. Kebanyakan penulis menyetujui bahwa hukum adalah suatu bentuk pengawasan sosial, itulah mengapa secara esensial sifatnya normatif, dan hal itu merujuk pada apa yang disebut (sebagai) konsepsi-konsepsi yang obyektif. Implikasi pendekatan semacam ini adalah: bahwa hukum

memberi input kepada pranata pengendalian sosial (apapun variant-nya) dan kemudian kepada rujukan berpikir masyarakat, dan sebaliknya.

Hukum, di sisi lain, dapat pula menyebabkan perubahan perangkat berpikir, dan rujukan kemasyarakatan lainnya atau dikenal dalam sosiologi hukum sebagai "*law as tool of social engineering*". Namun, bila kesemua hal itu berubah (dan pada kenyataannya memang selalu demikian), maka hukum pun berubah mengikuti perubahan masyarakat dan lingkungannya. Bidang ilmu lainnya, seperti dengan ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu sejarah, dan sebagainya. Kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, oleh karena itu, kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum.

Norma atau kaidah menurut antropologi hukum adalah pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Norma atau kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan.. Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada dua orang atau lebih di situ ada hukum.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi sendiri lahir dari seorang tokoh yang berkebangsaan Prancis August Comte lewat karangannya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive*. Sosiologi

berasal dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Tugas utama sosiologi hukum adalah menyelidiki apa yang seharusnya menjadi tugas hukum dalam masyarakat.

4. Perbedaan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum

ANTROPOLOGI HUKUM	SOSIOLOGI HUKUM
Antropologi hukum kajian utamanya adalah masyarakat pra modern, bersahaja, primitif.	Sosiologi Hukum kajiannya adalah pada masyarakat yang modern dan yang sudah kompleks
Perbedaan lahir dari ilmu : Lahir dari sebuah proses ketertarikan orang Eropa Barat menjelajah dunia khususnya mempelajari orang Asia, Afrika, kegiatan ini dimulai oleh Colombus. (Menemukan pengalaman-pengalaman {fase-fase})	Lahir untuk menyelesaikan pemecahan persoalan, lahir dari revolusi di Prancis.
Konsekuensi Metodologi: Pendekatan Metodologinya adalah deskriptif analitik (yang menjelaskan yang Kualitatif)	Yang bersifat evaluatif (yang bersifat kuantitatif)

Dalam Menganalisis data-data yang sudah terungkap:	Analisis Deduksi (umum-khusus)
Menggunakan Analisis Induksi (khusus-umum).induksi adalah persepsi sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum	

5. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

Perbedaannya, dalam hukum adat yang merupakan penemuan dari adat yang memiliki konsekuensi hukum. Sedangkan Antropologi Hukum, disamping mempelajari norma hukum juga ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan di antara aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat . Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan antropologi hukum lebih luas karena tidak hanya memperhatikan hukum di Indonesia, tetapi juga bersifat komparatif sehingga hukum ditinjau sebagai gejala yang bersifat lintas budaya. Perbedaaan antara antropologi hukum dengan hukum adat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

No	Item	Antroplogi Hukum	Hukum Adat
1	Obyek	Perilaku manusia	Norma hukum di luar UU
2	Pendekatan	Holistik	Yuridis normatif
3	Sifat Penelitian	Penelitian lapangan	Studi pustaka & dokumen
4	Norma	Kenyataan	Dikehendaki

Dari tabel diatas terlihat bahwa obyek antropologi hukum adalah perilaku hukum dari manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh

anggota masyarakat . Selanjutnya pendekatan yang dipakai antropologi hukum adalah holistik, dari kata keseluruhan, artinya dalam mempelajari sesuatu akan dilihat secara keseluruhan. Meminjam teori sistem, hukum hanyalah entitas sub sistem yang dipengaruhi dan dipengaruhi oleh sub sistem yang lain, misalnya sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sifat penelitian, pada antropologi hukum lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan dari pada studi pustaka. Sebaliknya hukum adat, lebih mengutamakan studi pustaka dan dokumen dari penelitian lapangan.

C. PENUTUP

Antropologi berasal dari kata Yunani *άνθρωπος* (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia.

Hukum juga diartikan sebagai disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan) dan ilmu pengetahuan (ilmu hukum). Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan (misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum).

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat

hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak

Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu

Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.

<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan

Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017.

<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1,

Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.

Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat

Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018,

<https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.

Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata

Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017,

<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..